

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## **INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

### **TAHUN 2022**

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, perlu meningkatkan indikator kinerja utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja utama pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten ada 3 (tiga), yaitu :

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD;
2. Capaian Maturitas SPIP;
3. Capaian Kapabilitas APIP.

#### **1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui

pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi, 2007).

Keberadaan SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia sebenarnya merupakan bentuk amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya memberikan amanat untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja dalam sebuah sistem. Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Kategori nilai SAKIP

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
A	>80 ± 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
BB	>70 ± 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
B	>60 ± 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
CC	>50 ± 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

## 2. Capaian Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian pemerintah dalam mencapai tujuan intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri atas unsur:

1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

Sedangkan simpulan hasil evaluasi SPIP berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data/informasi, dikategorikan sebagai berikut:

1. Efektif, jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dapat mencegah atau mengendalikan risiko yang akan terjadi, serta capaian kinerja Aktivitas Utamanya adalah di atas 90%.
2. Kurang Efektif, jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan belum sesuai untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja Aktivitas Utamanya adalah di antara 75% s.d 90%.
3. Tidak Efektif, jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan tidak efektif untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja Aktivitas Utamanya adalah 75% ke bawah.

### Kategori Level Maturitas SPIP

Level	Definisi	Karakteristik SPIP
0	Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern
1	Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terkoordinasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak diidentifikasi
2	Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan pengendalian intern, namun tidak teridentifikasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai
3	Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai
4	Terkelola dan terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi
5	Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

### 3. Capaian kapabilitas APIP

Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Level kapabilitas APIP ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP, karena salah satu kriteria dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP harus terus meningkatkan kapabilitasnya untuk mampu memberikan penilaian independen dan objektif atas efektifitas operasi dari tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah organisasi.

6 (enam) elemen kapabilitas APIP :

#### 1. Peran dan layanan

Berdasarkan perannya kegiatan APIP dapat dikelompokan kedalam 2 (dua) yaitu peran sebagai penjamin (Assurance) dan peran sebagai konsultan (consulting). Sedangkan berdasarkan layanan yang dapat diberikan APIP untuk kegiatan Assurance mencakup kegiatan audit, evaluasi, reviu dan monitoring, sedangkan untuk layanan yang menyangkut konsultasi atau pemberian saran perbaikan mencakup

kegiatan pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan masukan/saran sesuai dengan fungsi APIP tanpa mengambil alih tugas dan tanggungjawab manajemen.

## 2. Pengelolaan SDM

Penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP dapat bekerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

## 3. Praktik Profesional

Mencakup penilaian terhadap kapabilitas APIP yang mencakup kebijakan, proses, dan praktik-praktik yang memungkinkan APIP bekerja secara efektif dengan melihat keselarasan antara kebijakan, proses dan praktik-praktik APIP dengan prioritas dan strategi pengelolaan risiko.

## 4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja

Hal yang ditekannya ada pada upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, mengendalikan operasional APIP, dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

## 5. Budaya dan hubungan organisasi

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur organisasi dan manajerial internal.

## 6. Struktur tata kelola

Struktur tata kelola mengacu pada kombinasi antara kebijakan dan proses serta struktur yang diterapkan pada APIP dalam rangka menginformasikan, mengatur, mengelola dan memantau kegiatan guna meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan tercapai.

### Kategori Level Kapabilitas APIP

Level	Definisi	Karakteristik
1	<i>Initial</i>	Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih bergantung kepada kinerja individual auditor yang dimiliki sehingga <b>APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi</b>
2	<i>Infrastructure</i>	Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang sudah selaras dengan standar audit dengan <i>outcome</i> <b>mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses telah sesuai dengan peraturan serta mampu mendeteksi terjadinya korupsi</b>
3	<i>Integrated</i>	Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, <i>outcomenya</i> <b>APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.</b>
4	<i>Managed</i>	Audit internal telah mengintegrasikan semua informasi diseluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko, dengan <i>outcome</i> <b>APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern</b>
5	<i>Optimizing</i>	Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan <i>outcome</i> <b>APIP menjadi agen perubahan</b>

Target dan Realisasi Capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

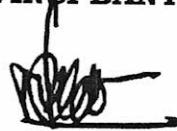
Target Capaian Kinerja Sasaran  
Inspektorat Daerah TA. 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	90
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Level	4
		Capaian Level Kapabilitas APIP	Level	4

*Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2017-2022 Inspektorat Daerah  
Provinsi Banten*

Serang, Januari 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**



**Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA.**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**